

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG 2016



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG 2016



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN DELI SERDANG 2016

Nomor ISBN : 978-602-6374-74-5

Nomor Publikasi : 12120.1735

Katalog BPS : 4102002.1212

Ukuran Buku : 21 X 29,7 cm

Jumlah Halaman : x + 80 halaman

Penyusun Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Penyunting Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Dicetak Oleh :
CV. Rilis Grafika

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu IPM.

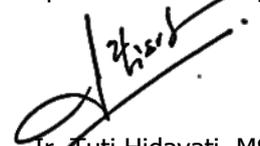
Badan Pusat Statistik telah menghitung IPM dengan metode baru. Metode baru diharapkan dapat memberikan potret pembangunan manusia lebih utuh. Publikasi ini menyajikan data IPM Kabupaten Deli Serdang dan keterkaitannya dengan indikator-indikator lainnya sehingga dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan manusia.

Publikasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi tahun 2016 saja, namun juga dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sehingga dapat melihat perkembangan pembangunan manusia selama periode 2015-2016. Selain itu publikasi ini juga membandingkan hasil pembangunan manusia dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini menjadi titik awal ketersediaan data khususnya data pembangunan manusia dapat dipenuhi dengan baik. Kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung kami ucapkan terimakasih.

Lubuk Pakam, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang



Ir. Tuti Hidayati, MSi
NIP. 19661211 199401 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penyajian	5
BAB 2. URAIAN TEORITIS	9
2.1. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran	9
2.2. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya.....	12
2.3. Indeks Pembangunan Manusia : Ukuran Pencapaian Pembangunan	13
2.4. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	15
2.5. Kedudukan IPM Dalam Pembangunan Daerah.....	16
2.6. Sistem Informasi Pembangunan Manusia	17
2.7. Sumber Data Pemantauan Pembangunan Manusia dan Kerangka Kerja Sama.....	17
2.8. Hubungan Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	18
BAB 3. METODOLOGI	25
3.1. Sumber Data.....	25
3.2. Metode dan Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia	25
3.3. Konsep dan Definisi	30
BAB 4. KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG	35
4.1. Kependudukan	35
4.2. Pendidikan	37
4.3. Kesehatan	39
4.4. Perumahan	40
4.5. Perekonomian	42

BAB 5.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	47
5.1.	Komponen-komponen IPM.....	47
5.2.	Status Pembangunan Manusia	51
5.3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia	52
BAB 6.	KESIMPULAN	57
LAMPIRAN	59

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi ..	11
Gambar 3.1.	Status Indeks Pembangunan Manusia.....	29
Gambar 4.1.	Penduduk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	35
Gambar 4.2.	Komposisi Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Kelompok Umur Tahun 2016	36
Gambar 4.3.	Status Pendidikan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	38
Gambar 4.4.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	38
Gambar 4.5.	PDRB per Kapita (Jutaan) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	42
Gambar 5.1.	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	47
Gambar 5.2.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	48
Gambar 5.3.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	49
Gambar 5.4.	Daya Beli (000/Tahun) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	51
Gambar 5.5.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	52
Gambar 5.6.	PDRB per Kapita Dengan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016.....	53
Gambar 5.7.	Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016	53

LAMPIRAN TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk/Km ² Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan Tahun 2016	61
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	62
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	63
Tabel 1.4.	Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2016	64
Tabel 2.1.	Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.....	65
Tabel 2.2.	Jumlah Guru Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	66
Tabel 2.3.	Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	67
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Kelompok Umur, Aktivitas Pendidikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	68
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	69
Tabel 2.6.	Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Usia 10 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Tahun 2016	70
Tabel 3.1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.....	71
Tabel 3.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	72
Tabel 3.3.	Persentase Balita Kabupaten Deli Serdang Menurut Penolong Persalinan Pertama Tahun 2016	73
Tabel 4.1.	Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tahun 2016.....	74
Tabel 4.2.	Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang Menurut Luas Lantai (m ²) Tahun 2016.....	75
Tabel 4.3.	Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang Menurut Sumber Air Minum Tahun 2016.....	76
Tabel 4.4.	Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2016	77
Tabel 5.1.	PDRB, dan PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.....	78

Tabel 6.1. IPM dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016.....	79
Tabel 6.2. Perkembangan IPM dan Komponennya Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dan 2016.....	80

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

<https://id.wikipedia.org/wiki/BPS>
<https://bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi akan mampu berjalan maksimal.

Kondisi kualitas sumber daya manusia merupakan kelemahan mendasar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengalaman selama krisis ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan lebih cepat bangkit dari krisis yang melandanya.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa hubungan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan.

Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sangat perlu dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah. Kualitas sumber daya manusia tercermin dari terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi manusia untuk dapat menikmati hidup sehat, umur panjang, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pencapaian bagi ketiga unsur ini bukanlah merupakan hal yang mudah dan dilakukan upaya konkrit dan berkesinambungan.

Untuk mencapai umur panjang ataupun Angka Harapan Hidup yang tinggi, diperlukan dukungan akan tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, manusia harus meningkatkan kualitas pendidikannya, pembangunan pendidikan harus diutamakan untuk meningkatkan angka melek huruf. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun atau setingkat tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara meningkatkan daya beli.

Akhirnya dengan ketiga unsur di atas diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.

Secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (Produk Domestik Bruto (PDB)). Pembangunan sumber daya manusia menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan).

Namun perlu dicatat bahwa konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau ***Human Development Index (HDI)***.

Dalam rangka menyediakan data yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, dilakukan penelitian dan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian tersebut selain untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia, juga untuk melihat hubungan IPM tersebut dengan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan diadakannya analisis ini adalah untuk melihat perkembangan pembangunan manusia Kabupaten Deli Serdang tahun 2015, serta membandingkan hasil yang dicapai dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian yang dikemukakan dalam publikasi ini dikelompokkan menurut susunan sebagai berikut :

- BAB 1 : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, batasan masalah, serta maksud dan tujuannya.
- BAB 2 : Uraian teoritis, yang berisi konsep pembangunan manusia dan pengukuran, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, indeks pembangunan manusia : pengukuran pencapaian pembangunan, pemanfaatan indeks pembangunan manusia dalam perencanaan pembangunan daerah, kedudukan ipm dalam pembangunan daerah, sistem informasi pembangunan manusia, sumber data pemantauan pembangunan manusia dan kerangka kerja sama, hubungan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi
- BAB 3 : Metodologi, yang berisi sumber data yang digunakan, metode penghitungan, serta konsep dan definisi yang digunakan.
- BAB 4 : Kondisi Umum, yang berisi mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perekonomian di Kabupaten Deli Serdang.
- BAB 5 : Indeks Pembangunan Manusia, yang berisi komponen-komponen indeks pembangunan manusia (indeks pengetahuan, indeks kelangsungan hidup, dan indeks daya beli), status pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia
- BAB 6 : Kesimpulan, yang berisi kesimpulan dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya

BAB II
URAIAN TEORITIS

<https://riserocenterkab.bps.go.id>

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUKURAN

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995:12). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan (nafkah) dan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, yang demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumberdaya fisik, manusia, dan lingkungan-harus selalu diperbaharui (*replenished*).

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arrah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan

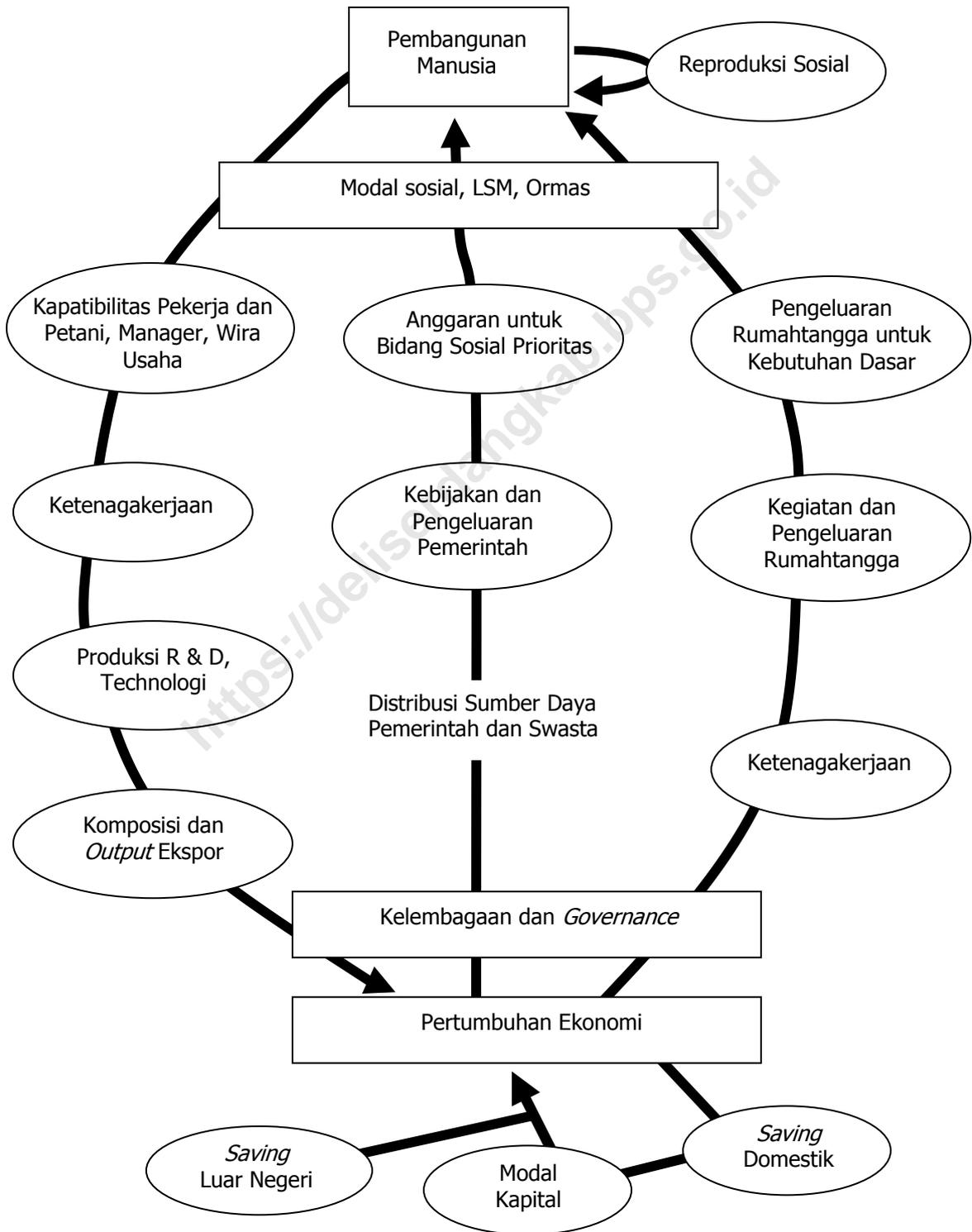
bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat (UNDP, 1965 : II).

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian diatas jauh lebih dari pada teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (**benefichartes**) bukan sebagai subjek perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik seperti disajikan pada gambar 2.1. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Arah panah bawah-atas menegaskan arti penting pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Arah panah atas-bawah yang merupakan asumsi dasar pendekatan SDM merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (**economic reasons**) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris.

Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang contoh : China dan negara di Asia Timur lainnya. Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan contoh : Sri Langka, Kosta Rika serta Trinidad Tobago. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

Gambar 2.1.
Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan
Pertumbuhan Ekonomi



Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan " jembatan utama " yang mengkaitkan antara keduanya (*UNDP, 1966 : 87*).

Hubungan atas bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada gambar diatas adalah jelas. Melalui upaya pembangunan manusia kemampuan dasar dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manager akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumberdaya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM dan organisasi kemasyarakatan.

Faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaan sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumberdaya juga jelas karena tanpa distribusi sumberdaya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumberdaya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan prilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai semacam katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

2.2. PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumberdaya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan

kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Azas pemerataan merupakan salah satu dari program pembangunan yang akan diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, adalah salah satu prinsip pembangunan manusia. Melalui strategi program *nawacita*, kebijakan pembangunan mengarah pada pemihakan terhadap kelompok penduduk yang tertinggal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. Di sektor ekonomi yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dan dengan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ditempuh secara makro ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan tumbuhnya kesempatan kerja dan berusaha memungkinkan peningkatan pendapatan penduduk yang secara nyata kemudian mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini merupakan 'jembatan utama' dalam meningkatkan daya beli melalui pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya merupakan prinsip pemerataan.

Pembangunan bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran di Indonesia hingga setengahnya yang kemudian berpengaruh pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk. Dari sudut pandang pembangunan, keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya yang akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia ditinjau dari berbagai indikator sosial berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah.

2.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: UKURAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN

Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar

(basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia, dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar. Dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya adalah angka harapan hidup waktu lahir (**e⁰**), pencapaian pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka Indeks Pembangunan Manusia harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks yang tercermin dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan yang diakibatkan banyaknya PHK dan menurunnya kesempatan kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang meningkat dari 6 % menjadi 78 % selama periode 1997–1998. Menurunnya tingkat kesempatan kerja atau meningkatnya tingkat pengangguran dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan

kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek.

2.4. PEMANFAATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas, melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk menyatakan kesetaraan gender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga gizi anak, untuk dapat membaca dan menulis. Indeks pembangunan manusia (IPM) dilain pihak mempunyai cakupan yang sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Kondisi ini disebabkan berbagai aspek sangat sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya. Namun bagaimanapun juga IPM lebih memadai dan lebih menyeluruh sebagai ukuran pembangunan dibanding ukuran tunggal pertumbuhan PDRB perkapita.

Sebagai ukuran komposit tunggal, IPM (antara 0 – 100) mengartikan tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah yang kemudian akan berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan :

- i. Antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode, atau
- ii. Antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain.

Untuk lebih memberikan petunjuk tentang status pembangunan manusia di suatu wilayah, sebagai alat ukur komposit, IPM harus dikaitkan dengan setiap indikator komponennya dan berbagai indikator lain yang relevan.

Di sektor perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu perumusan kebijakan yang lebih terarah, suatu kajian tentang situasi pembangunan manusia perlu dilakukan di suatu wilayah untuk memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu diperhatikan tingkat pencapaian setiap tahun. Karena itu kajian tentang pencapaian upaya pembangunan manusia perlu dilakukan dalam suatu periode tertentu, yang memberi kesempatan untuk mengkaji dampak dari program bagi peningkatan kapasitas dasar penduduk. Tingkat pencapaian setiap tahun menuju status pembangunan manusia yang ideal (*reduction in shortfall*) yang telah dihasilkan pada suatu periode merupakan validasi bagi kebijakan pembangunan yang telah diputuskan pada periode tersebut.

2.5. KEDUDUKAN IPM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan merupakan realisasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana. Proses perencanaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai program yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya. Suatu kajian yang membahas situasi dan kondisi yang obyektif tentang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, karenanya perlu dilakukan untuk menentukan pentahapan, pencapaian tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek serta untuk menentukan prioritas. Melalui kajian tersebut dirumuskan suatu kebijakan umum yang akan menjadi pedoman bagi para perencana dalam merancang berbagai program.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena Indeks Pembangunan Manusia menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah, oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan suatu data set yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem data base pembangunan manusia. Sistem data base tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi kepada para pengambil keputusan dan perumus kebijakan tentang langkah-langkah pada masa mendatang yang perlu dilakukan.

Penempatan IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah ditetapkan setelah berbagai kajian metodologis dan empirik dilakukan serta ujicoba pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.6. SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN MANUSIA

Analisis situasi merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan yang lazimnya dilakukan setelah visi dan sasaran jangka panjang ditetapkan. Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah tahapan perencanaan berikutnya yaitu penetapan prioritas dan sasaran jangka menengah dan jangka pendek serta mengidentifikasi pilihan kebijakan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan manusia, analisis situasi harus dilakukan secara menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap berkaitan dengan konsep global pembangunan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam analisis tersebut disebut sebagai isu pembangunan manusia.

Indek Pembangunan Manusia sebagai alat ukur status pembangunan manusia sangat sensitif terhadap perubahan yang sedang terjadi, sehingga IPM merupakan sistem informasi pembangunan manusia yang memusatkan perhatian pada kemajuan dan pencapaian program sektoral serta kajiannya dengan program nasional. Pada tingkat kabupaten/kota kajian ini disebut Analisis Situasi Pembangunan Manusia karena hanya mengkaji kemajuan dan pencapaian suatu wilayah, sedangkan pada tingkat provinsi kajian ini disebut Laporan Pembangunan Manusia karena juga mengkaji perbandingan kemajuan dan pencapaian antar wilayah kabupaten/kota dan indikator yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia dan diperkaya dengan permasalahan yang spesifik daerah yang dikemukakan.

2.7. SUMBER DATA PEMANTAUAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KERANGKA KERJA SAMA.

Data yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia adalah data yang dapat menggambarkan status pembangunan manusia pada tahun yang bersangkutan dan pencapaiannya. Pada tahun-tahun berikutnya tiap tahun akan diperbaharui data-datanya dengan data yang baru, sehingga pemantauan tentang upaya pembangunan manusia dapat dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun.

Pemanfaatan data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik untuk perencanaan secara intensif baru dilakukan di tingkat pusat. Di tingkat provinsi pemanfaatan data statistik belum seintensif yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tingkat pusat, terlebih lagi pemanfaatan di tingkat kabupaten/kota yang sangat sedikit. Hal ini terjadi karena dalam sistem pengumpulan data BPS sangat jarang dihasilkan data yang terpadu yang dapat mengkaitkan berbagai macam variabel agar dapat mengungkapkan fenomena dan perkembangan yang terjadi secara representatif untuk tingkat kabupaten/kota.

Dalam hal ini BPS telah merancang Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) agar menjadi suatu alat untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan pembangunan sektor sosial

atau kesejahteraan rakyat serta pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten dan kota setiap tahun. Selain itu, data SUSENAS dapat digunakan untuk mengkaji kaitan antar variabel sektoral misalnya: kesehatan, pendidikan, perumahan, pengeluaran dan konsumsi rumah tangga untuk dapat mengungkapkan perkembangan fenomena tertentu misalnya perkembangan atau peningkatan kualitas hidup yang setiap tahun di masing-masing kabupaten/kota.

Pemanfaatan secara optimal dari data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten/kota akan sangat membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Data yang semestinya dimanfaatkan dalam pembangunan daerah bukan saja data bidang sosial, tetapi juga data bidang ekonomi seperti PDRB, dan statistik Keuangan Daerah yang bersama data pencatatan administrasi hasil pelayanan instansi sektoral akan memperkaya ketersediaan data dan kajian yang diperlukan para pengambil keputusan dan perumusan kebijakan di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) memerlukan dukungan BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal penyediaan data dan kajian yang diperlukan dalam penyusunan dan merancang program pembangunan. Karena itu adalah penting untuk memanfaatkan data yang dihasilkan oleh BPS. Dalam hal ini pemanfaatan akan lebih ditekankan pada data yang banyak digunakan dalam kerangka pembangunan manusia pada tingkat implementasi program sebenarnya merupakan pembangunan sektor kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan manusia dalam suatu wilayah diperlukan suatu kelompok kerja yang beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BPS, instansi sektoral dan universitas yang mempunyai dua fungsi utama.

Fungsi pertama adalah upaya memperbaharui data dalam sistem informasi yang dapat dilakukan oleh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dengan dukungan Bappeda Provinsi maupun Bappeda Kabupaten/Kota.

Fungsi kedua adalah membuat analisis situasi pembangunan manusia memanfaatkan data yang telah tersedia di daerah masing-masing. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok kerja secara bersama-sama dengan dukungan dan dipimpin oleh Bappeda. Pemantauan yang dilakukan ini merupakan kerja bersama antar sektor ataupun disebut kerangka kerjasama BPS–Bappeda.

2.8. HUBUNGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (*human development*) telah mengundang Ramirez dkk untuk melakukan suatu studi di tahun 1998. Pada saat yang bersamaan, Hers (1998) juga menyebutkan adanya persoalan simultanitas dalam model empiris yang banyak digunakan dalam studi-studi yang mengkaji

pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Simultanitas ini merupakan salah satu hal yang mengemuka dalam kritik terhadap studi-studi yang mengestimasi pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jalur pertama dari hubungan rantai yang dimaksudkan oleh Ramirez dkk adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia. Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran *civil society* seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Alokasi antar dan dalam lembaga-lembaga tersebut dan perbedaan perilakunya dapat menjadi penyebab perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun tingkat kinerja ekonominya setara.

Kecenderungan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatan bersih mereka untuk barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia (seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan) tergantung dari sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga dan juga pada siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Sudah umum diketahui bahwa penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia. Sementara itu, perempuan juga memiliki andil yang tidak kecil dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Makin tinggi pendidikan perempuan akan makin positif bagi pembangunan manusia.

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh distribusi pendapatan dalam masyarakat, termasuk peran perempuan dan peran pemerintah. Alokasi sumber daya untuk pembangunan manusia dari sisi pemerintah tersebut merupakan fungsi dari tiga hal, yakni: total pengeluaran sektor pemerintah, berapa banyak yang digunakan untuk sektor-sektor pembangunan manusia, dan bagaimana dana tersebut dialokasikan di dalam sektor sosial tersebut. Adapun peran organisasi masyarakat dan LSM sendiri umumnya sebagai pelengkap, hanya di sejumlah negara tampak sangat dominan karena menjadi pendorong terpenting bagi pembangunan manusia.

Jalur kedua adalah dari pembangunan manusia ke pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Begitu pula, modal sosial akan meningkat seiring dengan tingginya pendidikan.

Tentu dalam hal ini juga penting adanya investasi dan juga distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Sementara itu, investasi juga memungkinkan sumber daya manusia untuk bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih meyakinkan jika memang sudah ada kebiasaan untuk mendukung pendidikan yang baik yang mana tergantung pada tahapan pembangunan itu sendiri. Selain itu, pengaruh positif itu juga jika terdapat tingkat investasi yang tinggi, distribusi pendapatan yang lebih merata, dukungan untuk modal sosial yang lebih baik, serta kebijakan ekonomi yang lebih memadai.

Dalam konteks Indonesia, dua jalur hubungan itu dapat pula dilihat dalam kaitannya dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Akita dan Alisjahbana (2002) menunjukkan bahwa Jawa dan Bali adalah wilayah yang paling merosot perekonomiannya. Sementara itu, Irian Jaya dan Maluku justru merupakan wilayah yang paling rendah kemerosotan indeks pembangunan manusianya (BPS-Bappenas-UNDP, 2001). Kendati indeks pembangunan manusia kedua wilayah tersebut tetap lebih rendah ketimbang provinsi-provinsi lainnya dan juga pendapatan perkapitanya, namun hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah daerah yang sumber daya manusianya lebih berkualitas lebih mampu bertahan dari krisis ekonomi misalnya dilihat dari besarnya kemerosotan pendapatan perkapitanya? Sebaliknya, apakah daerah yang pendapatan perkapitanya sudah lebih tinggi lebih bisa untuk terus mendukung pembangunan manusia di daerahnya ?

Pertanyaan-pertanyaan itu kurang lebih sejalan dengan pendapat Ramirez dkk (1998) yang dari studi *cross-country* mereka menemukan bukti adanya hubungan positif dan kuat pada kedua jalur hubungan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ditambahkan pula bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial dan pendidikan perempuan penting artinya dalam memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia; sementara tingkat investasi dan distribusi pendapatan memperkuat hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris, Garcia dan Soelistianingsih (1998) telah mengestimasi pengaruh variabel modal manusia (diukur dengan pangsa penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berpendidikan tingkat dasar atau menengah), rasio murid terhadap guru (untuk mengukur *coverage* upaya pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk pendidikan), fertilitas total (jumlah rata-rata anak yang lahir untuk setiap perempuan berumur 15 sampai 49 tahun) – selain pangsa sektor minyak dan gas dalam PDRB untuk mengukur ketersediaan sumber daya alam—terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuannya adalah bahwa investasi untuk

pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan regional.

Sedangkan Wibisono (2001) memasukkan variabel-variabel *educational attainment* (diukur dengan tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan), angka harapan hidup (*life expectancy*), tingkat fertilitas (*fertility rate*), tingkat kematian bayi (*infant mortality rate*), laju inflasi dan juga variabel dummy regional juga terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dari estimasi-estimasi yang dilakukan, diperoleh temuan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan adalah pendidikan, angka harapan hidup, dan tingkat kematian bayi. Sedangkan tingkat fertilitas dan laju inflasi memberikan efek negatif terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan.

Kedua studi di atas juga mengkonfirmasi bahwa modal manusia (*human capital*) dalam bentuk pendidikan maupun kesehatan mempunyai kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan berarti juga berguna untuk mempercepat proses pemerataan pendapatan antardaerah.

<https://www.serikab.bps.go.id>

BAB III ***METODOLOGI***

BAB III

METODOLOGI

3.1. SUMBER DATA

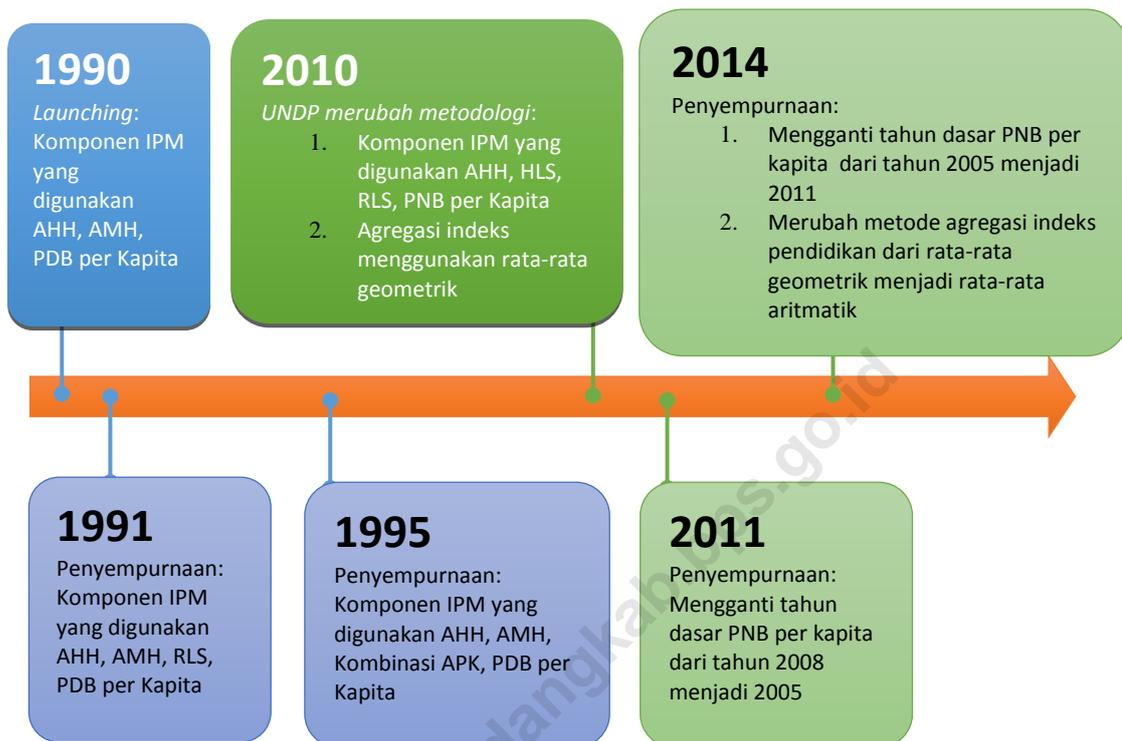
Sumber data yang digunakan dalam penulisan analisis ini adalah hasil pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas adalah survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya.

Sejak tahun 1992, BPS melalui Susenas mengumpulkan data Kor (keterangan pokok) dan data Modul (keterangan khusus) setiap tahun. Data modul dikumpulkan bersamaan dengan data Kor setiap 3 tahun sekali, mencakup modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul pendidikan dan sosial budaya, serta modul perumahan dan kesehatan. Mulai tahun 2011 Susenas Kor dan Modul Konsumsi dilaksanakan secara triwulanan setiap tahun.

3.2. METODE DAN TAHAPAN PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometric menjadi rata-rata aritmatik. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru).



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau **Human Development Index (HDI)** merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (**longevity**), pengetahuan (**knowledge**), dan standar hidup layak (**decent living**). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan **The United Nations Development Programme (UNDP)** dalam menghitung HDI.

3.2.1. Komponen-komponen IPM

Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (**life expectancy at birth**) yang biasa dinotasikan dengan e^0 . Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Pengetahuan

Seperti halnya UNDP, komponen IPM pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu harapan lama sekolah (***expected years of schooling***) dan rata-rata lama sekolah (***mean-years of schooling***).

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP, yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (***adjusted real GDP per capita***) sebagai indikator standar hidup layak. Analisis ini menggunakan indikator "rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan" (***adjusted real per capita expenditure***). Sumber data yang digunakan adalah Susenas dan survei lain yang mendukung.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, pada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

3.2.2. Tahapan Penghitungan IPM

1. Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran) sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$

2. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran;

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)
Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (000)	26.572	1.007	UNDP menggunakan GDP per kapita riil yang disesuaikan

3.2.3. Penentuan Status IPM

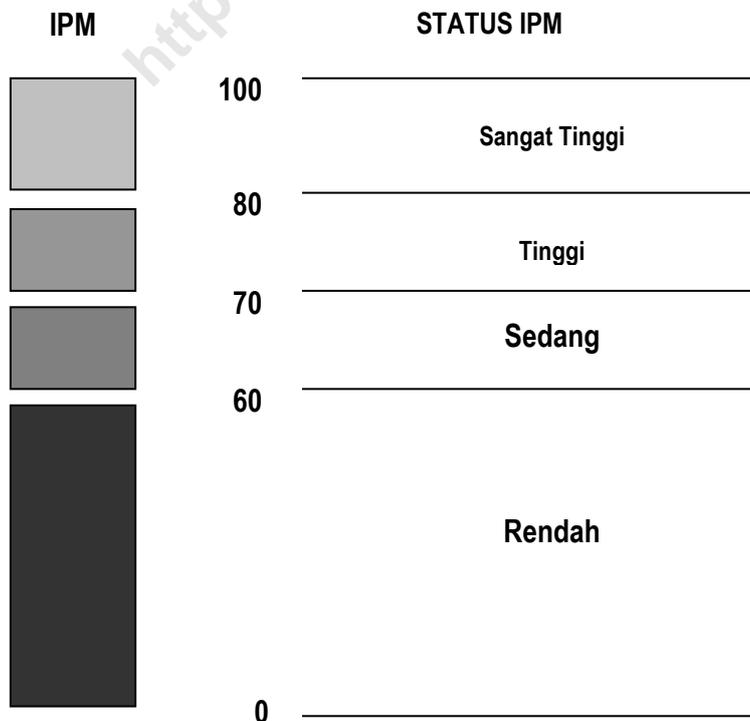
Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/kota, dibedakan 4 kriteria dimana status menengah dipecah menjadi dua seperti dibawah ini :

1. Rendah dengan nilai IPM kurang dari 60
2. Sedang dengan nilai IPM berada diantara 60 sampai kurang dari 70
3. Tinggi dengan nilai IPM berada antara 70 sampai kurang dari 80
4. Sangat Tinggi dengan nilai IPM lebih atau sama dengan 80

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

Gambar 3.1.
STATUS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



3.3. KONSEP DAN DEFINISI

3.3.1. Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga

Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

1). Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap sebagai rumahtangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
- Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang.
- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

2). Rumahtangga khusus, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih, tidak dicakup dalam survei ini

3.3.2. Pendidikan

Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah suatu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan baik di sekolah negeri atau swasta yang ditandai dengan adanya tanda tamat belajar/ijazah.

Partisipasi Sekolah dibedakan atas tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum

pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin maupun huruf lainnya.

3.3.3. Perumahan dan Lingkungan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap)

3.3.4. Konsumsi/Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita/bulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

BAB IV
KONDISI UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

<https://diser.kabupdelser.go.id>

BAB IV

KONDISI UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

4.1. KEPENDUDUKAN

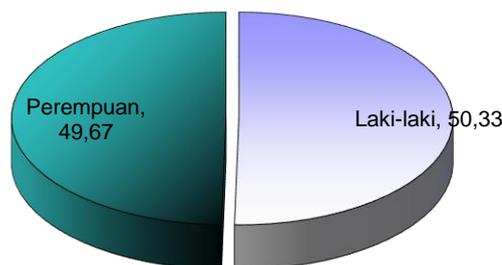
Penduduk merupakan faktor yang sangat dominan didalam pelaksanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, perkembangan kualitas, serta pengarahannya mobilitas penduduk, sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan. Lebih lanjut, pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa tujuan dari perkembangan kependudukan, yaitu untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

4.1.1 Jumlah, dan Persebaran Penduduk

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang diperkirakan mencapai 2.072.521 jiwa yang tersebar pada 22 (dua puluh dua) kecamatan. Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan wilayah kecamatan yang paling banyak penduduknya sebagai wilayah tempat tinggal dengan jumlah yang mencapai 445.223 jiwa atau 21,48 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang. Disusul oleh Kecamatan Sunggal dengan jumlah penduduk yang mencapai 282.009 jiwa dan Kecamatan Tanjung Morawa dengan jumlah penduduk mencapai 222.634 jiwa. Sebaliknya, Kecamatan Gunung Meriah merupakan wilayah kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.949 jiwa atau 0,14 persen dari total

Gambar 4.1
Penduduk Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016

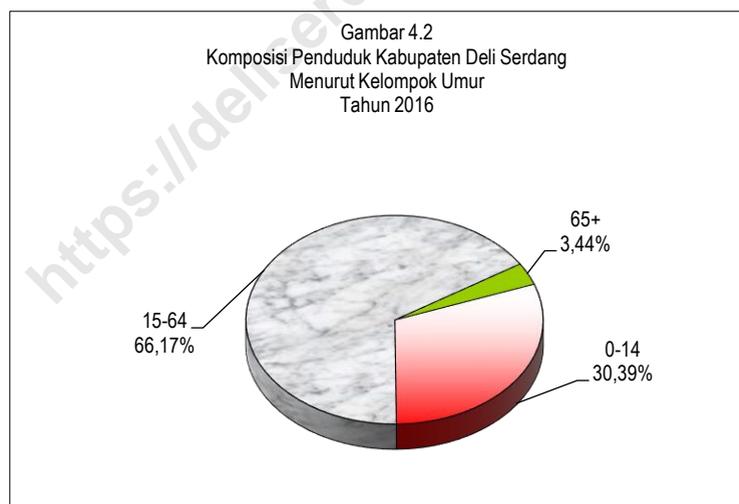


penduduk Kabupaten Deli Serdang.

Kepadatan penduduk Kabupaten Deli Serdang berada pada kisaran 830 jiwa/km². Dilihat menurut wilayah kecamatan, kepadatan penduduk antar kecamatan berada pada rentang 38 jiwa/km² hingga 7.489 jiwa/km². Kecamatan Deli Tua menduduki tempat pertama sebagai kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 7.489 jiwa/ km². Disusul oleh Kecamatan Sunggal dengan 3.048 jiwa/km² dan Kecamatan Lubuk Pakam dengan 3.015 jiwa/km².

4.1.2. Komposisi Umur

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan variabel penting dalam demografi. Hampir semua pembahasan mengenai masalah kependudukan melibatkan variabel umur dan jenis kelamin penduduk. Struktur umur penduduk antar daerah satu dengan daerah lain tidak sama. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor sosial ekonomi di suatu daerah akan mempengaruhi struktur umur penduduk lewat ketiga variabel diatas.



Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana untuk dianalisis jika dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas.

Suatu wilayah dikatakan mempunyai struktur umur muda jika proporsi penduduk usia 0-14 tahun lebih dari 30 persen, sementara proporsi kelompok umur usia 65 tahun ke atas kurang atau sama dengan 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua jika proporsi penduduk usia 0-14 tahun kurang dari atau sama dengan 30 persen, sementara proporsi kelompok usia 65 tahun lebih atau sama dengan 5 persen.

Dari hasil proyeksi penduduk 2016 dapat disimpulkan bahwa struktur umur Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan muda, dimana persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 30,39 persen sedangkan persentase penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas mencapai 3,44 persen.

4.2. PENDIDIKAN

Salah satu amanat yang diemban pemerintah menurut UUD'45 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana amanat ini dilaksanakan tercermin antara lain dari profil pendidikan penduduk yang akan dibahas secara singkat dalam uraian berikut yang menyajikan gambaran umum mengenai partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Pada tahun 2016, Kabupaten Deli Serdang memiliki 849 sekolah dasar, 274 sekolah menengah pertama, 133 sekolah menengah umum dan 135 sekolah menengah kejuruan. Penyediaan fasilitas pendidikan ini bukan hanya disediakan oleh Pemerintah, tetapi telah melibatkan peran serta pihak swasta, yang menunjukkan kepedulian yang sudah terjalin melalui penyediaan fasilitas pendidikan.

Untuk fasilitas pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama, keberadaan guru negeri mendominasi tenaga pendidik yang ada pada kedua fasilitas pendidikan tersebut. Dari 11.523 guru sekolah dasar, sebanyak 8.646 orang merupakan guru pada sekolah dasar negeri dan sebanyak 2.877 orang merupakan guru pada sekolah dasar yang dikelola pihak swasta.

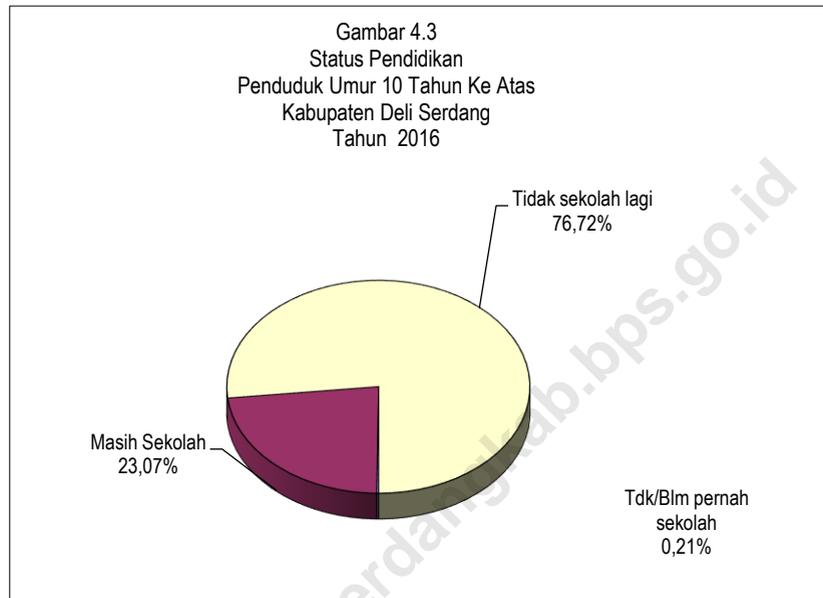
Untuk fasilitas pendidikan menengah pertama, dari 5.183 guru yang mengajar pada sekolah menengah pertama, sebanyak 2.360 orang merupakan guru pada sekolah menengah pertama negeri dan sebanyak 2.823 orang pada sekolah menengah pertama swasta.

Untuk fasilitas pendidikan menengah umum, dari 3.124 guru yang mengajar pada sekolah menengah umum, sebanyak 2.102 orang merupakan guru pada sekolah menengah umum swasta dan sebanyak 1.022 orang pada sekolah menengah umum negeri.

Untuk fasilitas pendidikan menengah kejuruan, dari 2.637 guru yang mengajar pada sekolah menengah kejuruan, sebanyak 2.034 orang merupakan guru pada sekolah menengah kejuruan swasta dan sebanyak 603 orang pada sekolah menengah kejuruan negeri.

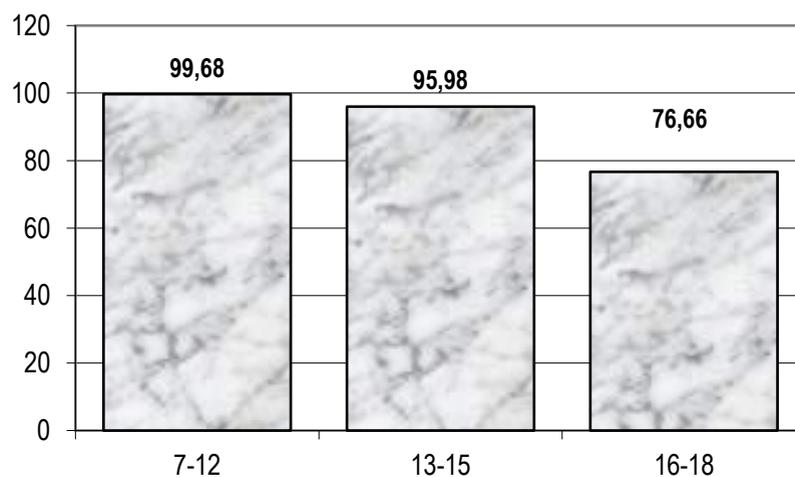
4.2.1. Partisipasi Sekolah

Secara umum, pada tahun 2016, masih dijumpai sebanyak 0,21 persen dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah di Kabupaten Deli Serdang dan sebanyak 76,72 persen sudah tidak sekolah lagi.



Bila dilihat lebih rinci menurut kelompok umur sekolah, partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 pada jenjang pendidikan dasar mencapai 99,68 persen.

Gambar 4.4.
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016



Pada jenjang pendidikan menengah pertama, partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun mencapai 95,98 persen. Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun, pada tahun 2012 sebesar 76,66 persen.

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Sebagaimana halnya dengan angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 10 tahun ke atas juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan.

Bila dilihat dari status pendidikan, secara total, penduduk umur 10 tahun ke atas didominasi oleh mereka yang sudah tidak bersekolah lagi, dengan kontribusi yang mencapai 76,72 persen. Penduduk yang sedang menjalani pendidikan dasar (SD) mencapai 8,05 persen, disusul oleh penduduk yang sedang menjalani pendidikan menengah pertama (SMP) sebesar 5,51 persen dan penduduk yang sedang menjalani pendidikan menengah atas (SMA) sebesar 6,50 persen.

Pendidikan dasar (SD) adalah jenjang pendidikan yang umumnya dinikmati oleh penduduk Kabupaten Deli Serdang yang berumur 10 tahun ke atas. Sebanyak 17,95 persen dari penduduk menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SD. Kemudian diikuti oleh mereka yang memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada SMP sebesar 21,18 persen dan SMA sebesar 42,95 persen.

4.3. KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh pemerintah, seperti puskesmas,

posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi.

Pada tahun 2016, fasilitas kesehatan yang siap melayani kesehatan masyarakat Deli Serdang terdiri atas 22 rumah sakit, 34 puskesmas, 106 puskesmas pembantu, 284 klinik/balai kesehatan, 354 praktek dokter dan 563 praktek bidan. Beragamnya fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang dimaksudkan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat.

4.3.1. Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong saat kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan dan keselamatan ibu dan kesehatan bayi serta pelayanan kesehatan secara umum.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.

Penolong kelahiran balita yang terbanyak di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 masih didominasi oleh bidan yang mencapai 64,94 persen. Selain bidan, penolong kelahiran oleh dokter kandungan juga banyak dipilih masyarakat yaitu sebanyak 29,58 persen.

Dipilihnya bidan oleh mayoritas masyarakat sebagai penolong kelahiran bukan hanya karena biaya yang lebih murah namun juga karena sebagian besar masyarakat lebih meyakini penanganan kelahiran oleh bidan lebih baik karena lebih sabar dan lebih alamiah.

4.4. PERUMAHAN

Disamping kebutuhan akan pangan dan sandang, perumahan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup vital. Keadaan tempat tinggal rumah tangga dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perumahan, dan sampai seberapa jauh program perumahan nasional dapat menjangkau golongan masyarakat yang memerlukan perumahan. Apabila masyarakat telah mampu menempati rumah yang layak,

mungkin prioritas program pemerintah di bidang perumahan dapat diturunkan, begitu pula sebaliknya.

Informasi penting mengenai keadaan perumahan yang disajikan dalam publikasi ini adalah kondisi fisik bangunan seperti luas lantai. Selain menyajikan kondisi fisik bangunan, publikasi ini juga menyajikan fasilitas perumahan seperti sumber air minum dan status kepemilikan bangunan tempat tinggal (rumah).

4.4.1. Kondisi Fisik Bangunan

Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu kriteria untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga karena harga tanah yang semakin tinggi saat ini, semakin luas lantai suatu rumah tangga semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga.

Pada tahun 2015, secara umum sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang telah menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m² dan 60-99 m², masing-masing sebesar 24,33 persen dan 47,08 persen. Di sisi lain, masih juga dijumpai rumah tangga yang mempunyai luas lantai kurang dari 20 m² sebesar 1,18 persen.

4.4.2. Fasilitas Perumahan

Air yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor pendukung untuk menciptakan hidup yang sehat. Oleh karena itu, kualitas air minum yang tersedia biasanya menjadi perhatian utama bagi seseorang yang akan memilih tempat tinggal. Air ledeng/air dalam kemasan merupakan sumber air minum yang mempunyai kualitas paling baik karena sebelum air tersebut didistribusikan kepada rumah tangga terlebih dahulu melalui proses penjernihan dan sterilisasi.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, pada umumnya mayoritas rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang membeli air isi ulang sebagai sumber air minum yaitu sebesar 50,19 persen. Disusul oleh rumah tangga yang memanfaatkan sumur bor/pompa sebesar 18,02 persen dan sumur terlindung sebesar 17,21 persen.

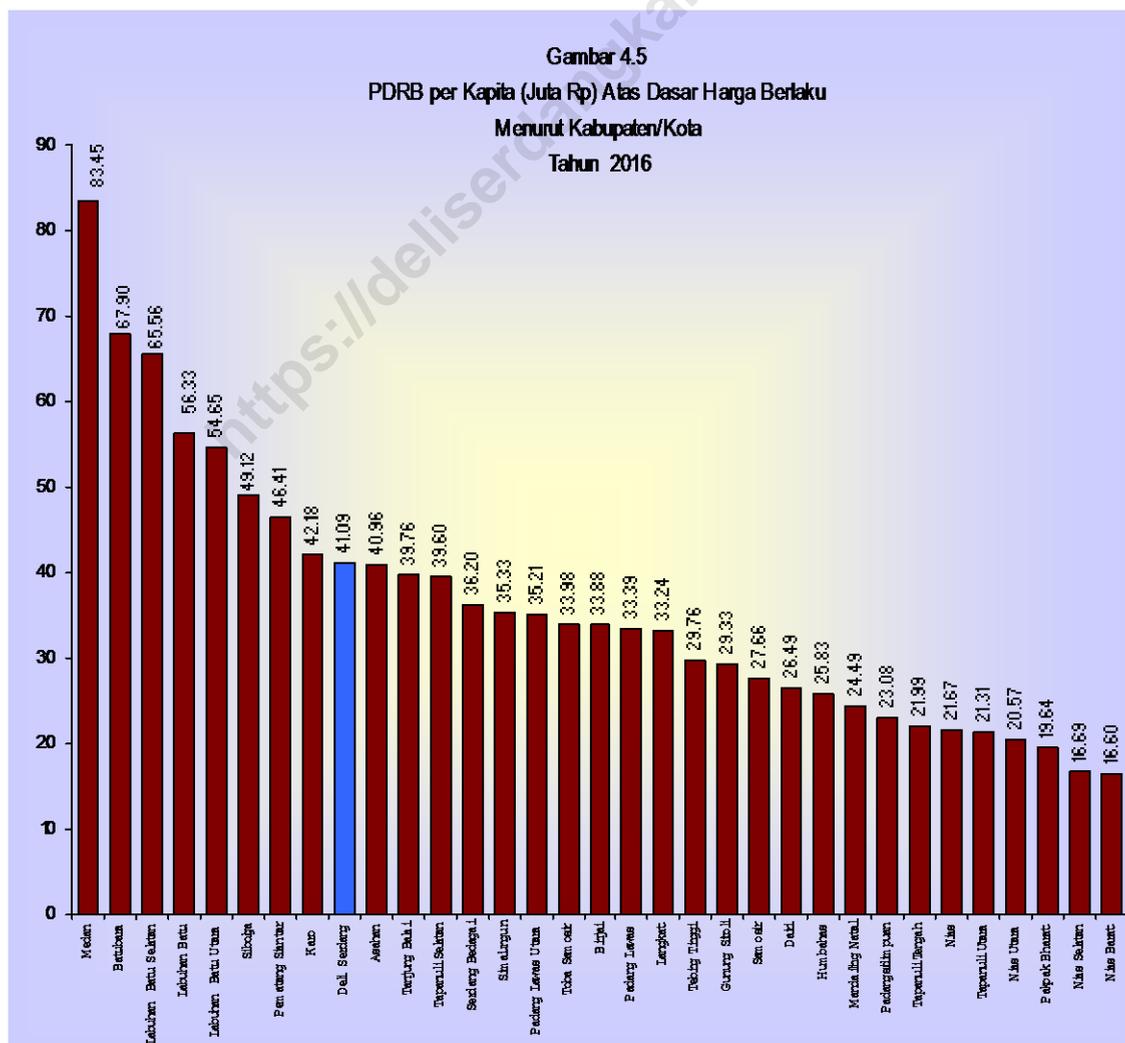
Pada tahun 2016 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari ledeng dan air dalam kemasan bermerk sebagai sumber air minum masing-masing sebesar 8,41 persen dan 3,87 persen.

4.5. PEREKONOMIAN

Pembangunan ekonomi melalui pembangkitan sektor riil tetap menjadi prioritas utama arah kebijakan pemerintah daerah dalam rangka untuk memperluas kesempatan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian nilai tambah dari setiap sektor ekonomi dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2016 angka Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Deli Serdang dicapai sebesar 85,15 trilyun rupiah atau berada pada peringkat ke-2 bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara. Bilamana angka tersebut dikoreksi dengan pengaruh inflasi, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2016 sebesar 61,84 trilyun rupiah.

Sedangkan PDRB perkapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 sebesar 41,09 juta rupiah, jika dibanding dari tahun sebelumnya ada kenaikan dimana pada tahun 2015 PDRB perkapita sebesar 37,81 juta rupiah.



4.5.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, di Kabupaten Deli Serdang penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 14,95 persen, sektor industri pengolahan/manufacture sebanyak 29,23 persen, dan sektor jasa-jasa sebesar 55,83 persen.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, lebih setengah (52,19 persen) penduduk yang bekerja di Deli Serdang adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar mencapai sekitar 6,19 persen, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 6,81 persen. Hanya 2,46 persen penduduk Deli Serdang yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota keluarganya.

BAB V

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://www.dangdang.com/ps-go.id>

BAB V

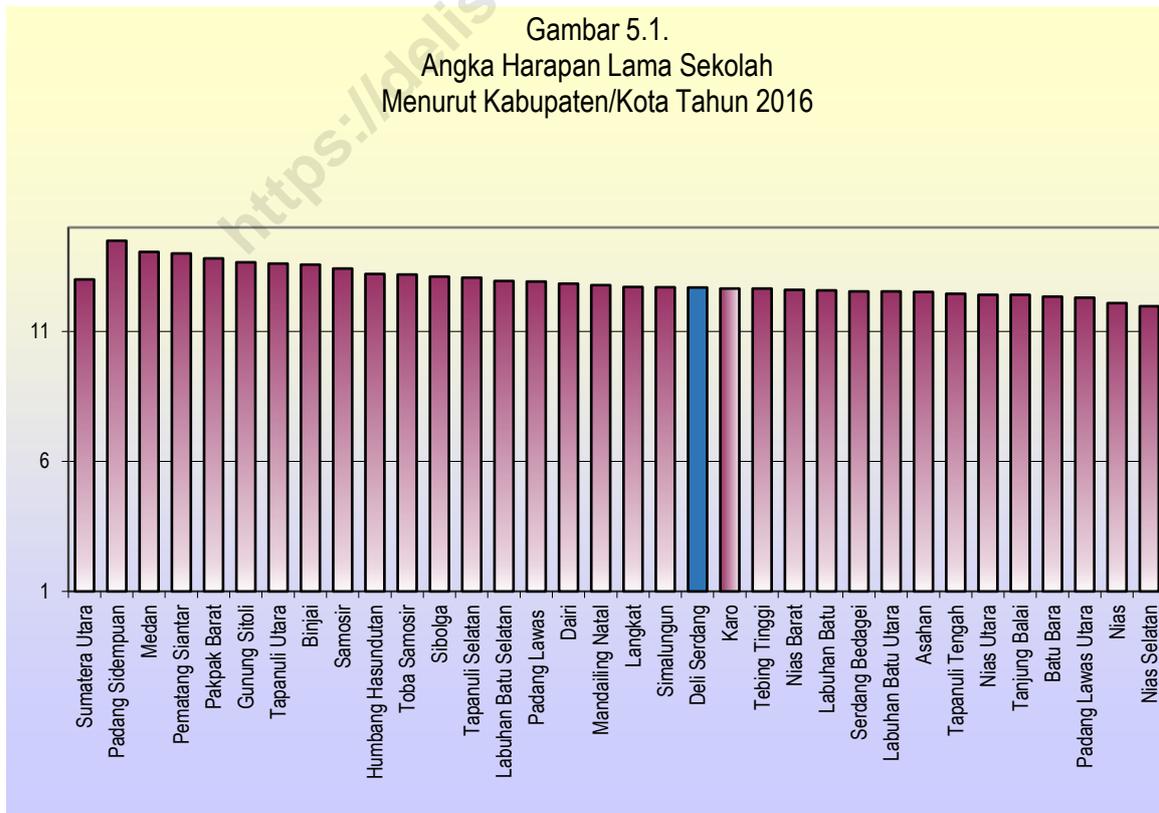
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

5.1. KOMPONEN KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

5.1.1. Indeks Pengetahuan

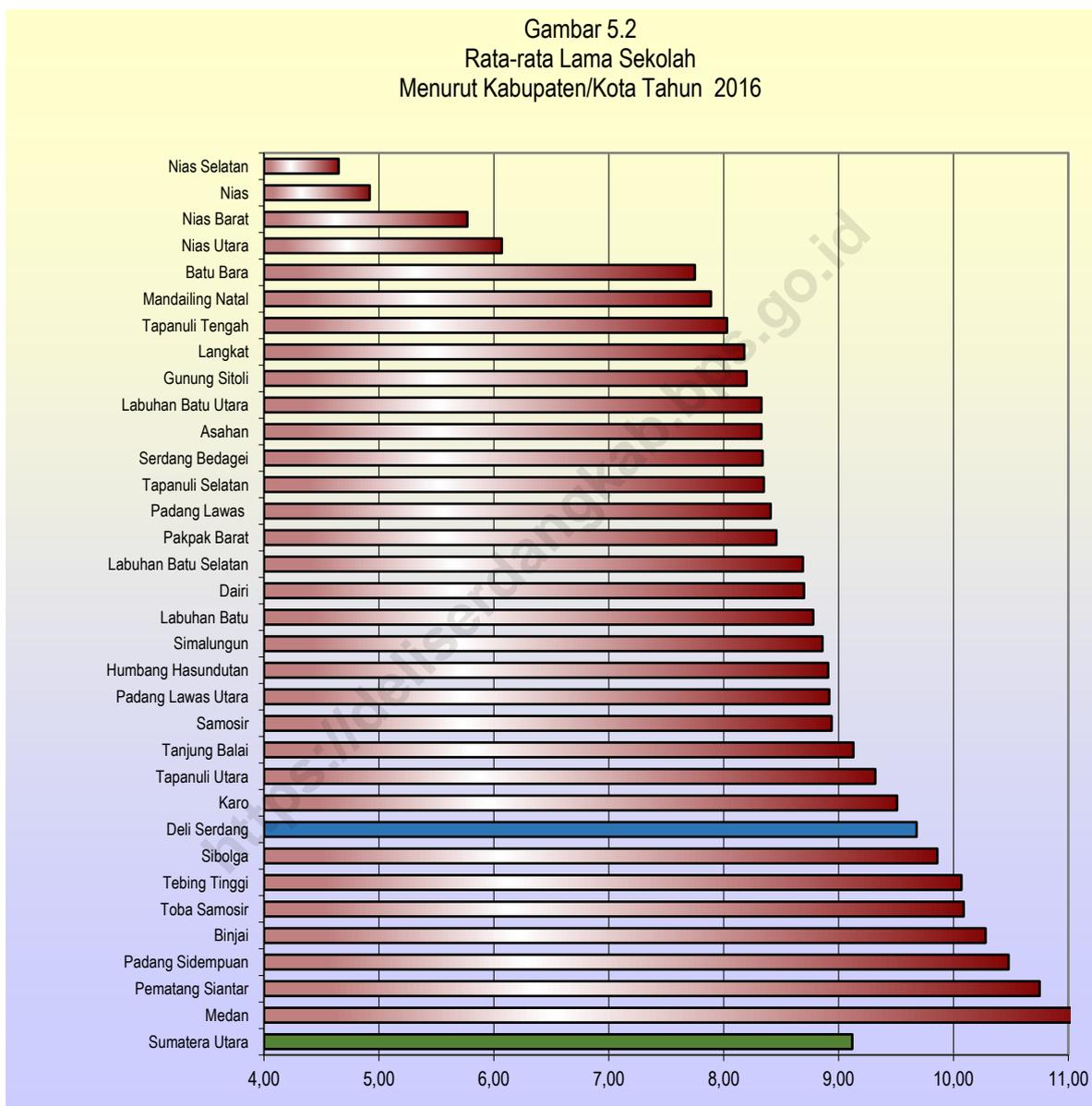
Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar dan mulai tahun 1994 meningkat menjadi wajib belajar 9 tahun. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga telah banyak upaya pemerintah dalam upaya melaksanakan amanat ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk menghitung IPM adalah angka harapan lama sekolah yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.



Dari gambar 5.1 memperlihatkan bahwa harapan lama sekolah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 sebesar 12,69 tahun, di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang

mencapai sebesar 13,00 tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, harapan lama sekolah Kabupaten Deli Serdang berada peringkat ke-19.



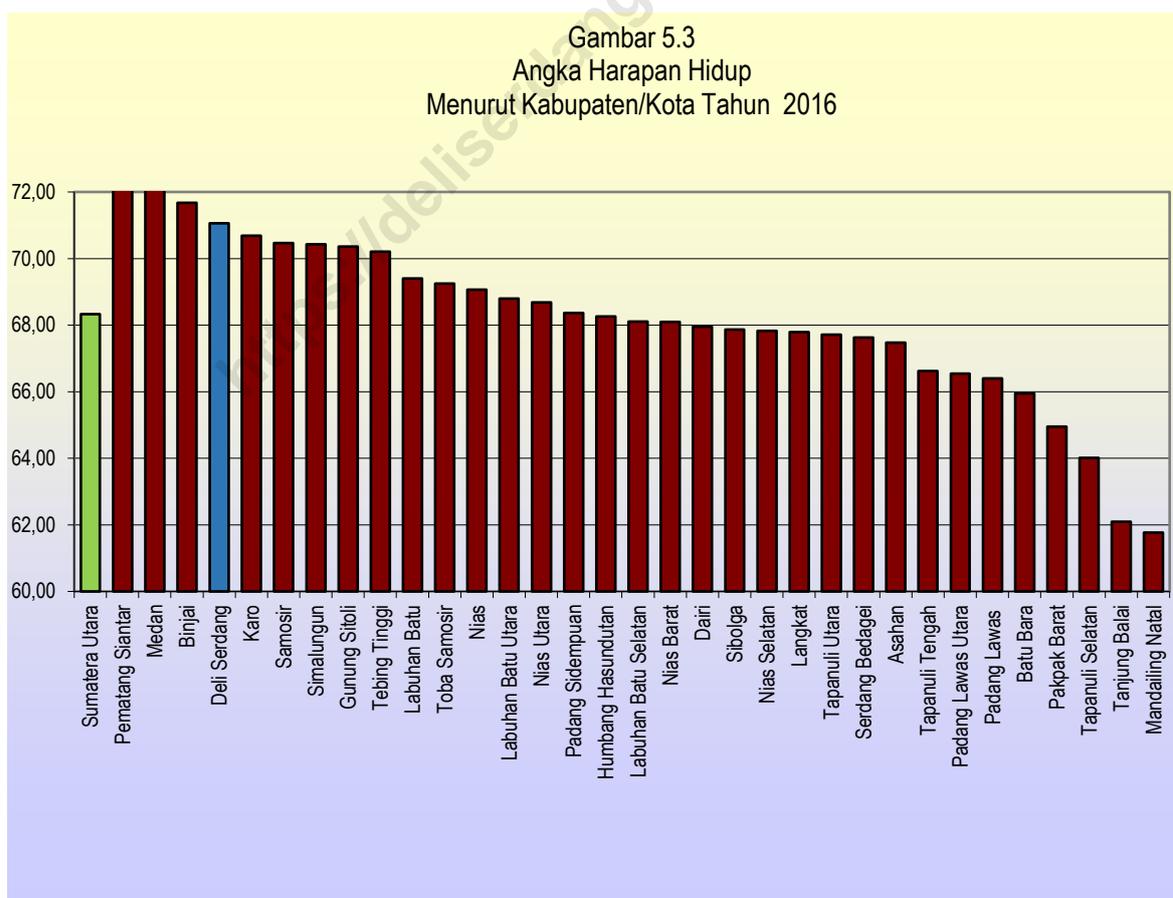
Indikator pendidikan selain harapan lama sekolah yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Deli Serdang sebesar 9,68 tahun. Berarti, secara umum penduduk di Kabupaten Deli Serdang sedang duduk di kelas 3 SLTP. Pencapaian rata-rata lama sekolah ini diatas Provinsi Sumatera Utara pada tahun yang sama. Pencapaian ini menempatkan Kabupaten Deli Serdang pada posisi ke-8 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

5.1.2. Indeks Kelangsungan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, dan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin baik.

Angka harapan hidup di Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan pada tahun 2016 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Deli Serdang 71,06 tahun yang berarti penduduk Kabupaten Deli Serdang yang baru lahir pada tahun



2016 mempunyai harapan yang besar untuk mencapai umur 71 tahun. Angka harapan hidup tersebut meningkat dari 71,00 tahun pada tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara secara umum, pencapaian angka harapan hidup penduduk Kabupaten Deli Serdang berada diatas pencapaian angka harapan hidup penduduk Sumatera Utara yang mencapai 68,33 tahun. Pencapaian ini juga menempatkan Kabupaten Deli Serdang pada urutan ke-4 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

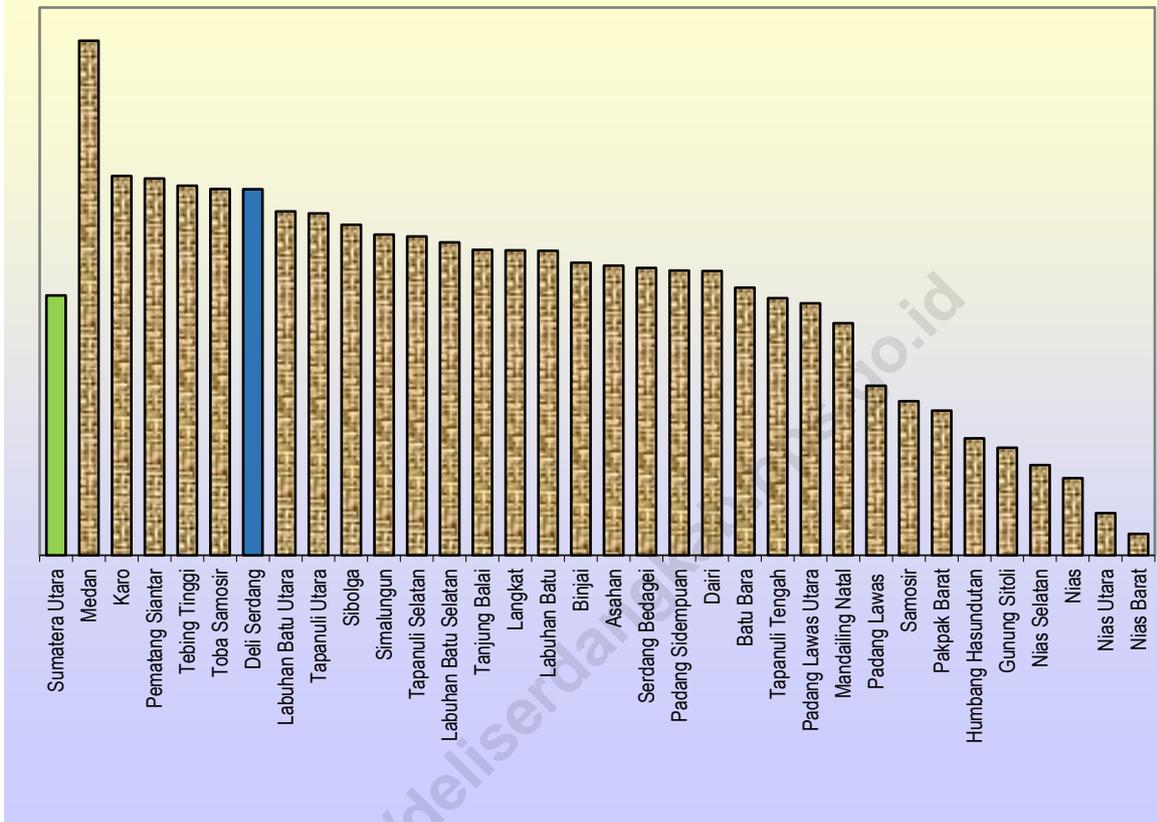
5.1.3. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam memproduksi berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran per kapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda. Oleh sebab itulah pengeluaran per kapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Seiring dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik yang ditandai dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi ke arah positif, berdampak kepada meningkatnya daya beli penduduk Kabupaten Deli Serdang khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau daya beli Kabupaten Deli Serdang terus mengalami peningkatan dari 11,359 juta rupiah pada tahun 2015 menjadi 11,683 juta rupiah pada tahun 2016. Dibandingkan dengan indikator lainnya, indikator ini berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Utara dan menempati peringkat ke-6 di antara kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Gambar 5.4
 Daya Beli (000/Tahun)
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

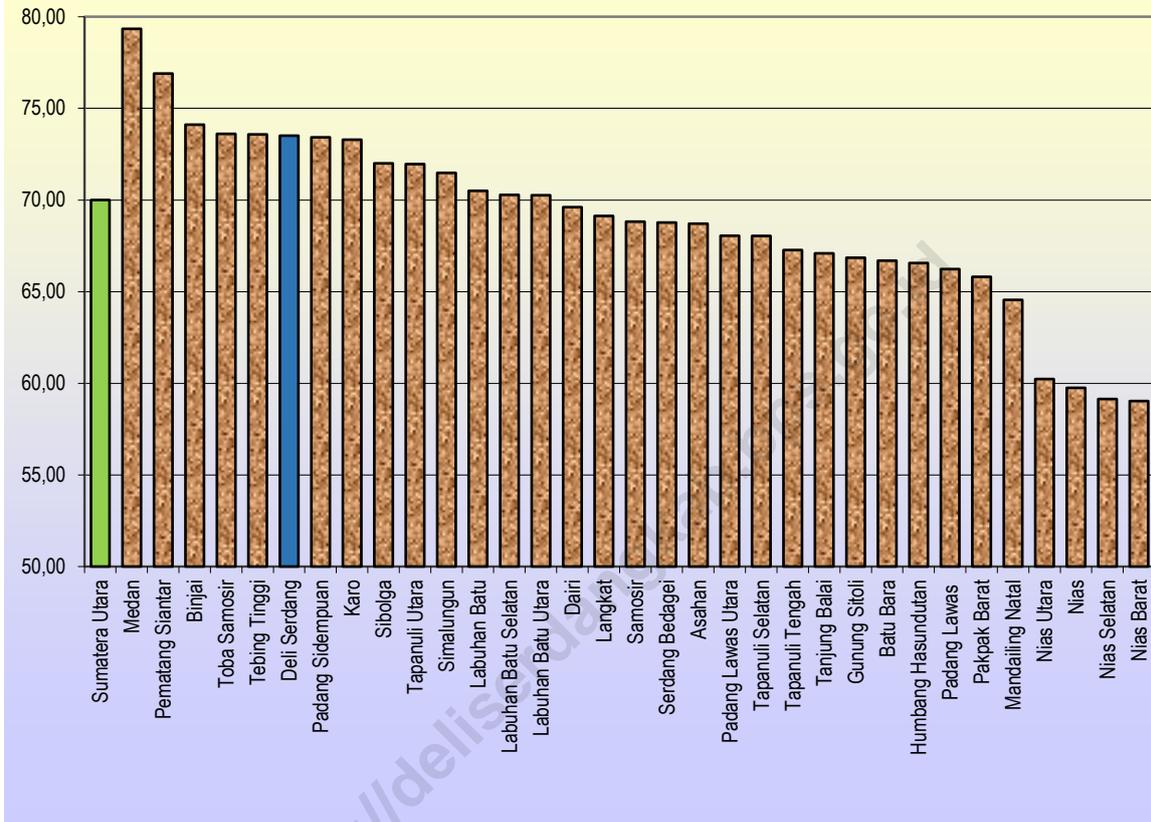


5.2. STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sejalan dengan perkembangan komponen pembentuk IPM yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Deli Serdang juga mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 72,79 pada tahun 2015 menjadi 73,51 pada tahun 2016. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, IPM Kabupaten Deli Serdang berada di peringkat ke-6.

Jika berdasarkan status, IPM Kabupaten Deli Serdang baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016 berada pada golongan tinggi. Dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, pencapaian ini merupakan suatu hal yang patut dibanggakan masyarakat Deli Serdang. Dan pencapaian ini hendaknya dapat menjadi dorongan dan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk secara terus menerus dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 5.5
Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016



5.3. **PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**

Untuk melihat hubungan antara pencapaian PDRB per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara, dilakukan pengelompokan pencapaian. Pengelompokan pencapaian ini membagi Kabupaten/Kota kedalam 4 kuadran dengan titik tengah adalah pencapaian PDRB per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara.

Terkait hubungan antara pencapaian PDRB per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia, didapatkan gambaran pada tahun 2016, Kabupaten Deli Serdang masih berada pada kelompok Kabupaten/Kota dengan pencapaian PDRB per Kapita rendah dan IPM di atas pencapaian Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 5.6.
PDRB PER KAPITA DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2016
(Titik Tengah PDRB per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara)

		Indeks Pembangunan Manusia			
		Tinggi		Rendah	
PDRB per Kapita	Tinggi	Medan, L.Batu Selatan, P.Siantar, Labuhan Batu, Sibolga, L. Batu Utara,		Batu Bara	
	Rendah	Deli Serdang Padang Sidempuan Tapanuli Utara Tebing Tinggi	Simalungun Toba Samosir Binjai Karo	Humbang Hasundutan Mandailing Natal Tapanuli Tengah Pakpak Bharat Asahan, Padang Lawas, Serdang Bedagai, P.Lawas Utara,	Tanjung Balai, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Nias, Langkat, Dairi Samosir, Tapanuli Selatan, G.Sitoli

Sedangkan bila dilihat keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan IPM, menunjukkan keadaan dimana Deli Serdang berada pada kelompok Kabupaten/Kota dengan pencapaian IPM diatas Provinsi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi diatas Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 5.7.
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2016
(Titik Tengah Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara)

		Indeks Pembangunan Manusia			
		Tinggi		Rendah	
Pertumbuhan Ekonomi	Tinggi	Deli Serdang, Medan, Binjai, Simalungun, P.Sidempuan, L.Batu Utara, L.Batu Selatan		Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, G.Sitoli, Padang Lawas, Samosir, Asahan, Tanjung Balai, Pakpak Bharat	
	Rendah	Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Sibolga,	P.Siantar T. Tinggi, Karo	Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan Nias Barat, Nias Selatan, Batu Bara	Nias Utara, Langkat Dairi, Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan

<https://www.serodokter.com/kab.bps.go.id>

BAB VI

IKESIMPULAN

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- ❑ IPM Kabupaten Deli Serdang terus mengalami peningkatan dari 72,79 pada tahun 2015 menjadi 73,51 pada tahun 2016. Meningkatnya IPM tersebut sebagai akibat dari meningkatnya empat komponen pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita selama periode 2015-2016.
- ❑ IPM Kabupaten Deli Serdang pada 2016 berada di atas rata-rata provinsi dan menempati peringkat ke-6 di antara kabupaten/kota lain di Sumatera Utara.
- ❑ Jika dibanding IPM Provinsi Sumatera Utara, IPM Kabupaten Deli Serdang lebih tinggi besarnya terutama dari tiga indikator pembentuk IPM pada tahun 2016 yang berada di atas rata-rata provinsi. Angka harapan hidup yang tercapai sebesar 71,06 tahun, lebih tinggi dari pencapaian provinsi sebesar 68,33 tahun. Rata-rata lama sekolah yang dicapai sebesar 9,68 tahun, lebih tinggi dari pencapaian provinsi sebesar 9,12 tahun dan pengeluaran per kapita sebesar Rp 11.683.000 lebih tinggi dari provinsi yang sebesar Rp 9.744.000.

LAMPIRAN TABEL

<https://dps.kab.go.id>

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Deli Serdang
Menurut Kecamatan
Tahun 2016

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[5]
01. Gunung Meriah	76,65	2.949	38
02. STM. Hulu	223,38	14.327	64
03. Sibolangit	179,96	23.008	128
04. Kutalimbaru	174,92	41.549	238
05. Pancur Batu	122,53	98.367	803
06. Namo Rambe	62,30	42.346	680
07. Biru-Biru	89,69	39.498	440
08. STM. Hilir	190,50	35.553	187
09. Bangun Purba	129,95	25.086	193
10. Galang	150,29	71.520	476
11. Tjg. Morawa	131,75	222.634	1.690
12. Patumbak	46,79	102.470	2.190
13. Deli Tua	9,36	70.097	7.489
14. Sunggal	92,52	282.009	3.048
15. Hampanan Perak	230,15	173.708	755
16. Labuhan Deli	127,23	69.655	547
17. Percut Sei Tuan	190,79	445.223	2.334
18. Batang Kuis	40,34	65.090	1.614
19. Pantai Labu	81,85	49.938	610
20. Beringin	52,69	60.840	1.155
21. Lubuk Pakam	31,19	94.033	3.015
22. Pagar Merbau	62,89	42.621	678
Jumlah	2 497,72	2.072.521	830

Sumber : Deli Serdang Dalam Angka 2017

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Gunung Meriah	1.477	1.472	2.949
02. STM. Hulu	7.202	7.125	14.327
03. Sibolangit	11.469	11.539	23.008
04. Kotalimbaru	20.673	20.876	41.549
05. Pancur Batu	49.243	49.124	98.367
06. Namo Rambe	20.940	21.406	42.346
07. Biru-Biru	19.833	19.665	39.498
08. STM. Hilir	18.055	17.498	35.553
09. Bangun Purba	12.535	12.551	25.086
10. Galang	35.928	35.592	71.520
11. Tjg. Morawa	112.281	110.353	222.634
12. Patumbak	51.952	50.518	102.470
13. Deli Tua	34.524	35.573	70.097
14. Sunggal	142.031	139.978	282.009
15. Hamparan Perak	88.310	85.398	173.708
16. Labuhan Deli	35.430	34.225	69.655
17. Percut Sei Tuan	223.927	221.296	445.223
18. Batang Kuis	33.019	32.071	65.090
19. Pantai Labu	25.744	24.194	49.938
20. Beringin	30.851	29.989	60.840
21. Lubuk Pakam	46.598	47.435	94.033
22. Pagar Merbau	21.092	21.529	42.621
Jumlah	1.043.114	1.029.407	2.072.521

Sumber : Deli Serdang Dalam Angka 2017

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang
Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2016

Golongan Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
0 – 4	113.307	108.391	221.698
5 – 9	109.943	105.052	214.995
10 – 14	98.763	94.437	193.200
15 – 19	96.233	93.313	189.546
20 – 24	95.387	93.217	188.604
25 – 29	87.061	87.518	174.579
30 – 34	82.760	84.373	167.133
35 – 39	77.884	78.981	156.865
40 – 44	71.736	70.529	142.265
45 – 49	60.625	59.468	120.093
50 – 54	50.137	49.995	100.132
55 – 59	40.336	39.914	80.250
60 - 64	26.279	25.620	51.899
65 - 69	15.544	16.166	31.710
70 – 74	9.113	10.635	19.748
75 +	8.006	11.798	19.804
Jumlah	1.043.114	1.029.407	2.072.521

Sumber : Deli Serdang Dalam Angka 2017

Tabel 1.4
 Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang 10 Tahun Keatas
 Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin
 Tahun 2016

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
- Belum Kawin	42,05	34,04	38,05
- Kawin	55,88	56,75	56,32
- Cerai Hidup	0,74	1,51	1,12
- Cerai Mati	1,33	7,70	4,51
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 2.1.
Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016

Prasarana Pendidikan	Klasifikasi		
	Negeri	Swasta	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sekolah Dasar	583	266	849
2. Sekolah Menengah Pertama	63	211	274
3. Sekolah Menengah Atas	21	112	133
4. Sekolah Menengah Kejuruan	10	125	135

Sumber : Deli Serdang Dalam Angka 2017

Tabel 2.2.
Jumlah Guru Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016

Prasarana Pendidikan	Klasifikasi		
	Negeri	Swasta	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Sekolah Dasar	8.646	2.877	11.523
2. Sekolah Menengah Pertama	2.360	2.823	5.183
3. Sekolah Menengah Atas	1.022	2.102	3.124
4. Sekolah Menengah Kejuruan	603	2.034	2.637

Sumber : Deli Serdang dalam Angka 2017

Tabel 2.3
 Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Usia 10 Tahun Keatas
 Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin
 Tahun 2016

Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,35	0,07	0,21
Masih Sekolah			
- SD	8,22	7,88	8,05
- SMTP	5,58	5,44	5,51
- SMTA	6,72	6,28	6,50
- Diploma/Sarjana	2,07	3,96	3,02
Tidak Bersekolah Lagi	77,06	76,37	76,72
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 2.4
 Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang
 Menurut Kelompok Umur, Aktivitas Pendidikan, dan Jenis Kelamin
 Tahun 2016

Aktivitas Pendidikan Menurut Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
PENDUDUK 10 TAHUN KEATAS	100,00	100,00	100,00
- Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,35	0,07	0,21
- Masih Sekolah	22,59	23,56	23,07
- Tidak Sekolah Lagi	77,06	76,37	76,72
PENDUDUK 7-12 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Sekolah Lagi	0,63	0,00	0,32
- Masih Sekolah	99,37	100,00	99,68
PENDUDUK 13-15 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Sekolah Lagi	4,83	3,19	4,02
- Masih Sekolah	95,17	96,81	95,98
PENDUDUK 16-18 TAHUN	100,00	100,00	100,00
- Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Sekolah Lagi	20,55	26,45	23,34
- Masih Sekolah	79,45	73,55	76,66

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 2.5
 Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Usia 10 Tahun Keatas
 Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
 Tahun 2016

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0,35	0,07	0,21
Tidak/Belum Tamat SD	10,66	11,56	11,11
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
- SD	16,38	19,53	17,95
- SMTP	18,66	23,71	21,18
- SMTA Umum	39,68	33,61	36,65
- SMTA Kejuruan	7,92	4,68	6,30
- Diploma I/II	0,16	0,14	0,15
- Diploma III	0,81	1,93	1,37
- Diploma IV/Sarjana keatas	5,38	4,77	5,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 2.6
 Persentase Penduduk Kabupaten Deli Serdang Usia 10 Tahun Keatas
 Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin
 Tahun 2016

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]
Huruf Latin	99,33	98,98	99,15
Huruf Arab	31,35	31,30	31,33
Huruf lainnya	5,27	5,13	5,20

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 3.1.
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2016

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
[1]	[2]
Rumah Sakit Umum	22
Puskesmas	34
Puskesmas Pembantu	106
Klinik/Balai Kesehatan	284
Praktek Dokter	354
Praktek Bidan	563

Sumber : Deli Serdang Dalam Angka 2017

Tabel 3.2.
 Jumlah Tenaga Kesehatan di
 Kabupaten Deli Serdang
 Tahun 2016

Tenaga Kesehatan	Jumlah
[1]	[2]
Dokter	692
Perawat	1.465
Bidan	1.579
Farmasi	181
Ahli Gizi	99
Teknisi Medis	219
Sanitasi	34
Kesehatan Masyarakat	125

Sumber : Deli Serdang Dalam Angka 2017

Tabel 3.3
 Persentase Balita Kabupaten Deli Serdang
 Menurut Penolong Persalinan Terakhir
 Tahun 2016

Penolong Persalinan	Jumlah
[1]	[2]
1 Dokter Kandungan	29,58
2 Dokter Umum	4,39
3 Bidan	64,94
4 Tenaga Medis	1,09
5 Dukun	0,00
6 Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 4.1.
 Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang
 Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal
 Tahun 2016

Status Kepemilikan Tempat Tinggal	Persen
[1]	[2]
1 Milik Sendiri	66,80
2 Kontrak/Sewa	16,19
3 Bebas Sewa	13,16
4 Dinas	3,00
5 Lainnya	0,85
Jumlah	100.00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 4.2
 Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang
 Menurut Luas Lantai (m²)
 Tahun 2016

Luas Lantai	Persen
[1]	[2]
< 20	1,18
20 – 49	24,33
50 - 59	8,25
60 - 99	47,08
100 – 149	13,96
150 +	5,20
Jumlah	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 4.3
 Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang
 Menurut Sumber Air Minum
 Tahun 2016

Sumber Air Minum	Persen
[1]	[2]
1 Air Kemasan Bermerk	3,87
2 Air Isi Ulang	50,19
3 Ledeng Meteran	8,41
4 Ledeng Eceran	0,00
5 Sumur Bor/Pompa	18,02
6 Sumur Terlindung	17,21
7 Sumur Tidak Terlindung	1,02
8 Mata Air Terlindung	1,01
9 Mata Air Tidak Terlindung	0,11
10 Air Permukaan	0,00
11 Air Hujan	0,00
12 Lainnya	0,17
Jumlah	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 4.4
 Persentase Rumahtangga Kabupaten Deli Serdang
 Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar
 Tahun 2016

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Persen
[1]	[2]
1 Sendiri	88,64
2 Bersama	8,24
3 Umum	0,31
4 Lainnya	2,81
Jumlah	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2016

Tabel 5.1
PDRB, dan PDRB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 **)

Kabupaten/Kota	PDRB (Milyar Rp.)		PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)
	Atas Dasar Harga Konstan 2010	Atas Dasar Harga Berlaku	
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Nias	2.214,15	2.966,28	21.667.962,89
02. Mandailing Natal	7.935,03	10.661,04	24.491.077,08
03. Tapanuli Selatan	8.314,49	10.963,97	39.596.970,73
04. Tapanuli Tengah	6.032,21	7.849,65	21.992.877,34
05. Tapanuli Utara	5.070,19	6.300,29	21.312.628,59
06. Toba Samosir	4.769,81	6.140,47	33.982.692,41
07. Labuhan Batu	20.046,02	26.505,24	56.332.871,79
08. Asahan	22.308,20	29.189,60	40.957.277,08
09. Simalungun	23.507,97	30.191,08	35.332.318,55
10. Dairi	5.688,45	7.433,42	26.490.205,13
11. Karo	12.494,87	16.728,42	42.179.797,30
12. Deli Serdang	61.839,67	85.152,02	41.086.202,19
13. Langkat	25.533,81	33.949,47	33.244.425,69
14. Nias Selatan	3.662,19	5.194,79	16.686.383,01
15. Humbang Hasundutan	3.577,75	4.776,17	25.828.988,59
16. Pakpak Barat	717,89	911,09	19.638.887,25
17. Samosir	2.635,77	3.442,98	27.655.311,47
18. Serdang Bedagai	16.656,17	22.113,82	36.198.406,35
19. Batu Bara	21.127,23	27.498,71	67.900.062,15
20. Padang Lawas Utara	6.991,66	9.077,41	35.210.115,28
21. Padang Lawas	6.725,98	8.807,42	33.388.751,50
22. Labuhan Batu Selatan	16.088,42	21.004,17	65.559.964,02
23. Labuhan Batu Utara	14.843,99	19.374,23	54.654.596,64
24. Nias Utara	2.043,91	2.777,63	20.573.074,57
25. Nias Barat	1.074,48	1.415,85	16.600.241,44
26. Kota Sibolga	3.063,07	4.262,85	49.117.363,95
27. Kota Tanjung Balai	4.904,54	6.722,59	39.758.871,09
28. Kota Pematang Siantar	8.380,82	11.579,29	46.409.051,57
29. Kota Tebing Tinggi	3.400,69	4.729,18	29.761.604,70
30. Kota Medan	132.062,86	186.049,04	83.452.215,39
31. Kota Binjai	6.935,55	9.077,47	33.883.689,67
32. Kota Padang Sidempuan	3.636,87	4.913,28	23.076.048,36
33. Gunung Sitoli	2.876,36	4.038,52	29.329.895,98
Sumatera Utara	463.775,46	628.394,16	44.557.762,32

Keterangan: **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.1
IPM dan Komponennya
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Komponen IPM				IPM
	Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluara n Per Kapita (Rp. 000)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01. Nias	69,07	12,09	4,92	6.409	59,75
02. Mandailing Natal	61,77	12,78	7,89	9.237	64,55
03. Tapanuli Selatan	64,01	13,07	8,35	10.821	68,04
04. Tapanuli Tengah	66,62	12,45	8,03	9.694	67,27
05. Tapanuli Utara	67,71	13,61	9,32	11.242	71,96
06. Toba Samosir	69,25	13,19	10,09	11.687	73,61
07. Labuhan Batu	69,40	12,58	8,78	10.559	70,50
08. Asahan	67,47	12,52	8,33	10.288	68,71
09. Simalungun	70,43	12,70	8,86	10.855	71,48
10. Dairi	67,95	12,84	8,70	10.190	69,61
11. Karo	70,69	12,65	9,51	11.925	73,29
12. Deli Serdang	71,06	12,69	9,68	11.683	73,51
13. Langkat	67,79	12,71	8,18	10.567	69,13
14. Nias Selatan	67,83	11,97	4,65	6.647	59,14
15. Humbang Hasundutan	68,26	13,21	8,91	7.135	66,56
16. Pakpak Barat	64,95	13,81	8,46	7.641	65,81
17. Samosir	70,47	13,42	8,94	7.813	68,82
18. Serdang Bedagai	67,63	12,54	8,34	10.246	68,77
19. Batu Bara	65,95	12,34	7,75	9.886	66,69
20. Padang Lawas Utara	66,54	12,30	8,92	9.600	68,05
21. Padang Lawas	66,40	12,92	8,41	8.094	66,23
22. Labuhan Batu Selatan	68,11	12,94	8,69	10.712	70,28
23. Labuhan Batu Utara	68,80	12,54	8,33	11.278	70,26
24. Nias Utara	68,68	12,41	6,07	5.770	60,23
25. Nias Barat	68,10	12,60	5,77	5.391	59,03
26. Kota Sibolga	67,87	13,11	9,86	11.034	72,00
27. Kota Tanjung Balai	62,09	12,41	9,13	10.577	67,09
28. Kota Pematang Siantar	72,46	14,00	10,75	11.878	76,90
29. Kota Tebing Tinggi	70,21	12,65	10,07	11.747	73,58
30. Kota Medan	72,34	14,06	11,18	14.393	79,34
31. Kota Binjai	71,67	13,57	10,28	10.342	74,11
32. Kota Padang Sidempuan	68,37	14,49	10,48	10.198	73,42
33. Gunung Sitoli	70,36	13,66	8,20	6.963	66,85
Sumatera Utara	68,33	13,00	9,12	9.744	70,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.2
Perkembangan IPM dan Komponennya
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2015 dan 2016

Komponen IPM	Tahun	
	2015	2016
[1]	[2]	[3]
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,00	71,06
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,52	12,69
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,48	9,68
Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	11.359	11.683
IPM	72,79	73,51

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jl. Karya Utama Kompleks Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam-20514

Telp. 061-7951326, 7955111 Fax. 061-7951326

Email: bps1212@mailhost.bps.go.id website: <http://deliserdangkab.bps.go.id>

